

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
8	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Memuat Laporan Rekapitulasi LHKAN Provinsi Bali dan Daftar Wajib Lapor SPT Tahunan / LHKAN Inspektorat	Sekretaris	Inspektur	2025	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/lhkan-inspektorat/
9	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Memuat Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat	Sekretaris	Inspektur	2025	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/dokumen-pelaksanaan-anggaran-2025/
10	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	Memuat Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat	Sekretaris	Inspektur	2024	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/renstra/
11	Dokumen Rencana Kerja (RENJA)	Memuat Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat	Sekretaris	Inspektur	2025	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/renja/
12	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Inspektorat)	Sekretaris	Inspektur	2025	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/laporan-kinerja-instansi-pemerintah/
13	SOP	Memuat dokumen SOP khususnya yang berkaitan dengan Informasi Publik	Sekretaris	Inspektur	2025	v	v	1 Tahun	https://inspektorat.baliprov.go.id/sop-mengenai-informasi-publik/


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651231 198603 1 175



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Rincian Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat Jikadikecualikan
3	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Memuat dokumen hasil pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
4	Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	Memuat dokumentasi hasil rapat yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 UU No.43 Tahun 2009tentang Kearsipan Pasal 44 	Tidak Terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Biodata ASN	Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang, Riwayat Keluarga dan Dokumen bersifat pribadi lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data
6	Daftar Akun, Password dan Data Inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN	Memuat email, sso, LHKPN, LHKAN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data
7	Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	Memuat seluruh dokumentasi konfigurasi aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data



No	Rincian Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat Jikadikecualikan
8	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	Memuat dokumentasi pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data
9	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Dokumen surat yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data
10	Dokumen Pengadaan, SPJ Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Dokumen pengadaan dan surat pertanggung jawaban belanja	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Terbatas sampai proses pengadaan selesai dan setelah pelaksanaan Audit selesai dilaksanakan	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651231 198603 1 175



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

